

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mengalami masa-masa krisis dalam hal kepemimpinan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi di kalangan pejabat elit negara. Apalagi kita sering mendengar berita-berita yang muncul di TV maupun media sosial tentang berbagai permasalahan seperti kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang semakin banyak, kriminalitas dan asusila di kalangan anak-anak, belum lagi tentang pendidikan yang bergonta-ganti kurikulum, inefisiensi pelayanan publik, dan maraknya kasus korupsi. Oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut tentu beragam, mulai dari pejabat elit hingga kepala desa dan perangkat desa.

Kepemimpinan di Negara Indonesia saat ini memang sedang berada diujung tanduk, lemahnya kesadaran para pemimpin negara dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi alasan mendasar. Pemimpin yang seharusnya mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian suatu negara, kini malah tidak sedikit mengkhianati kepercayaan rakyatnya. Krisis kepemimpinan berakar dari rendahnya etika dan moral para pemimpin. Hal tersebut bisa dilihat melalui kasus korupsi yang setiap tahunnya semakin meningkat di Indonesia khususnya korupsi dana desa. Adapun grafik kasus korupsi yang menunjukkan kasus korupsi dana desa yang semakin meningkat :



Grafik tersebut menunjukkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan seorang pemimpin tentang pentingnya penerapan etika politik yang baik.

Pada dasarnya etika, moral, kebebasan, kewajiban, hak dan kewajiban merupakan hal-hal yang dianggap penting ketika membahas etika politik, baik yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan pemerintahan, maupun etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan lembaga sosial politik. Ketika konsep dasar etika dapat dipahami, maka demokrasi, transparansi, integritas, dan martabat dapat dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.¹

Etika politik merupakan filsafat yang menjelaskan moral dimensi politik berkehidupan manusia. Kata etika sendiri sudah tidak asing lagi dalam kehidupan politik, yang meliputi pengolahan masalah-masalah umum dalam dunia politik dan serangkaian metode pengambilan keputusan. Menurut Anthoni Giddens, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menjelaskan dua struktur sosial yang saling berkaitan, yaitu struktur sosial dan perilaku manusia. Keterkaitan antara keduanya akan menimbulkan etika politik dengan nilai yang berbeda, terjadi secara berurutan dan sistematis dalam suatu aturan tertentu.²

Etika politik adalah studi menyelidiki perilaku manusia antara yang baik dan yang salah dengan menilai perilaku manusia serasional mungkin. berdasarkan Souryal, etika bisa yang memiliki makna yang sebagaimana filsafat yang dijadikan mengukur prinsip-prinsip benar salah nya atau baik serta buruknya.³ Aristoteles percaya bahwa jika negara itu baik, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang baik dan warga

¹ Eko Handoyo, dkk, *Etika Politik : Edisi Revisi*, (Semarang: Widya Karya, 2016), h.1

² Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum: Esai Esai Ilmiah untuk Pembaruan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002),-h.102

³ Eko Handoyo, dkk, *Etika Politik : Edisi Revisi*, (Semarang: Widya Karya,-2016), h.1

negara yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika negara itu buruk, warga negara yang baik mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh negara yang buruk. Tapi jika dilihat sebagai pribadi, dia buruk. Dan sebaliknya, jika seseorang adalah orang baik sebagai orang di negara itu, maka dia adalah warga negara yang dianggap orang buruk.⁴

Ketika berbicara tentang kewajiban moral, juga berbicara tentang kewajiban manusia sebagai manusia. Untuk mencapai ketertiban atau cita-cita masyarakat, masyarakat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dan memerlukan kerjasama antar sesama manusia. Dalam berkolaborasi, seseorang juga perlu menjadi pemimpin agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Jika seorang pemimpin dikompromikan, begitu juga orang-orang yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin yang baik memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan wewenang kepada yang memberikannya, dan selain itu dapat membuat undang-undang yang adil. Intinya pemimpin harus bisa menerapkan prinsip keadilan daripada menerapkan hukuman yang adil antara bangsawan dan rakyat jelata. Ini adalah cara untuk menciptakan suasana yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah. Seorang pemimpin harus paham makna kata etika politik, namun ketika menjadi seorang pemimpin, tidak hanya mengerti, tetapi mampu mengamalkan dalam kehidupan. Karena etika politik dapat dijadikan sebagai landasan awal, sehingga dapat tercipta negara yang sejahtera.⁵

Semua pemimpin harus memiliki sikap mengayomi dan memperlakukan setiap warganya dengan perlakuan yang sama, seperti yang dilakukan oleh presiden ke-4 Indonesia K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) ketika beliau mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Gusdur mengembalikan perlakuan warga negara yang sama dan setara. Hal tersebut dapat membuat warga Indonesia dari Suku Tionghoa mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Sebelumnya warga Tionghoa mendapat

⁴ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h.6

⁵ Asep Sholahuddin, *Skripsi : Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun-* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.1

diskrimansi dari masyarakat Indonesia yang lain, baik itu diskriminasi dari sosial, budaya maupun ekonomi.

Pemimpin yang mempunyai etika baik, tidak hanya di lingkup luas, akan tetapi ada juga yang berada di lingkup desa. Banyak kepala desa yang memiliki kepemimpinan baik dan etika politik yang baik. Kepala desa dipilih langsung oleh warga kemudian diangkat oleh bupati/walikota yang merupakan pelopor utama kemajuan desa. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di bawah kepemimpinannya. Terkadang kecemasan ini seolah berhenti menjadi sebuah opini, namun cocok dari uji kebenarannya. Namun yang dibicarakan bukanlah tentang kekuasaan dan posisi yang efek yang dirasakan oleh mereka yang berada di lapangan pekerjaan.⁶

Dalam undang-undang pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Beberapa kewenangan dari kepala desa yang berkaitan dengan etika politik antara lain adalah memimpin pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, selain itu juga kepala desa bertugas untuk membina kerukunan, ketentraman, serta perekonomian masyarakat desa. Tentunya dalam menjalankan semua tugasnya tersebut dibutuhkan etika politik yang baik pula.⁷

Pelopor hendak menghamparkan kebijakan yang berlaku bagi masyarakat. Namun, mengklupas dengan pro dan kontra dari peraturan tersebut, namun banyak pionir belum menjalankan kekuasaan dan kepercayaannya dengan baik. Misalnya, memberikan seseorang jabatan langsung pada jabatan yang lebih tinggi karena hubungan dekat atau masih keluarga atau memiliki kepentingan politik tertentu, misalnya. Banyaknya kekuasaan ini disalahgunakan pada akhirnya akan menimbulkan opini publik di masyarakat yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena bagaimana seseorang mendapatkan posisinya akan

Aisyah Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h.5

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26

mempengaruhi bagaimana ia menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.⁸

Islam dianggap oleh banyak orang sebagai agama moral dan politik, mewakili semua aspek hukum Syariah, yang mengatur umat Islam dalam kehidupan keagamaan, sosial dan politik mereka. Aturan-aturan ini mengatur hubungan antara penguasa dan rakyatnya, hubungan sosial dan politik, dan antara Muslim dan non-Muslim. Hubungan ini membutuhkan tatanan moral atau perilaku moral, menjadikan hukum agama sebagai sumber sanksi moral. Islam sendiri memiliki dimensi etika politik yang lebih komprehensif, mulai dari tujuan dan sarannya hingga tindakan aktor politik itu sendiri. Namun, dalam etika politik, tindakan seorang pemimpin menentukan arah kebijakan orang-orang yang dipimpinnya, dan itikad baiknya yang didukung oleh institusi, baik berupa undang-undang, aturan, adat istiadat, maupun institusi sosial, dapat berperan. Tanggung jawab etis organisasi untuk mencapai kesepakatan bersama.⁹

Seperti yang sudah diterangkan di Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 58-59 tentang kepemimpinan dalam pandangan Islam :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

⁸ Aisyah Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h.7

⁹ Dedi Syaputra, *Tesis; Etika Politik: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), h.2

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

59. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)''.*

Sebagaimana dari ayat-ayat di atas dapat dipahami, pemimpin dalam anggapan agama Islam ialah merekalah yang diberdayakan oleh Allah untuk menggunakan kekuasaan atau kedudukannya dengan baik untuk menjadi pemimpin adil serta menjunjung tinggi Al-Qur'an dan As-sunnah.¹⁰

Islam mencetak banyak teoritikus memberikan sumbangan gagasannya bagi peradaban, dan Ibnu Taimiyah adalah salah satunya. Ia menuangkan gagasannya dalam karya-karyanya, salah satunya dalam buku Siyasa Syar'iah tentang etika politik Islam. Etika politik Islam memberikan kontribusi terhadap sistem pemerintahan dan ikut serta dalam mengelola proses pemerintahan sesuai dengan akhlak dan moral yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraannya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.¹¹

Etika politik Ibnu Taimiyah membimbing umat Islam untuk meraih kekuasaan dan kejayaan dengan membuat sejarah besar dengan menelaah pola-pola hubungan yang ada di antara manusia dan rasa kemanusiaan. Dari rumusan ini, Ibnu

¹⁰ Aisya Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan,2019), h.8

¹¹ Aisya Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan,2019), h.

Taimiyah hanya ingin membangun model yang baik di antara manusia yang didorong oleh adanya dakwah, dengan kembali ke hukum, untuk kebaikan bersama di antara umat, pemimpin dan Pencipta. Menciptakan hubungan yang transparan antara yang dipimpin. Allah swt. merupakan dasar dari segala perbuatan hukum, yang di dalamnya telah ditetapkan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan manusia.

Gagasan amal ma'ruf nahi mungkar yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah "Etika Politik" merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam untuk melindungi upaya rakyat suatu negara yang telah melupakan keadilan dan amanahnya. Setoran dari Allah. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, gagasan Ibnu Taimiyah untuk menciptakan negara yang ideal adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama pandangan hidupnya atau nilai-nilai politik yang baik, yaitu:

1. Bertanggung jawab (al-amanah)
2. Kesimbangan-(al-is)
3. Karib-(al-ukhuwah)
4. Memandang Keberagaman dan Keberagaman (ta'addudiyah)
5. Perbandingan (al-musawab)
6. Musyawarah (al-syura)
7. Perdamaian Prioritas-(al-silm)-
8. Pengendalian (amr-i-al-ma'ruf nahy-an al-munkar).¹²

Dalam kitab *Siyasah Syar'iyah*, bab pertama membahas tentang kedudukan dan tata cara pengangkatannya. Ibnu Taimiyah membagi gagasan tentang pemimpin menjadi empat kategori yaitu Mengangkat Ashlah (Paling Berkualitas dan Pas) artinya harus diangkat pemimpin yang terbaik atau paling cocok, Pilih yang terbaik, lalu pilih di bawahnya. Kemudian setidaknya seorang pemimpin itu berwibawa (quwwah) dan memberdayakan. Kemudian yang terakhir adalah mencari tahu mana yang bekerja dalam janji.¹³

¹² Dedi Syaputra, *Tesis; Etika Politik: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), h.2

¹³ Rofi' Munawar, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 3-19

Moral dan etika yang kuat diharapkan dapat mengurangi korupsi di Indonesia. Selain penguatan etika, reformasi birokrasi diperlukan sebagai salah satu cara untuk menciptakan pelayanan dan tata kelola yang baik. Melaksanakan reformasi demokrasi memang membutuhkan etika dalam politik atau pemerintahan. Pentingnya etika dan etika sebagai seorang pemimpin khususnya pada kepemimpinan Kepala Desa Tumpangkrasak.

Setiap masyarakat mengharapkan desanya untuk lebih maju lagi dari berbagai aspek, mulai dari bidang pemerintahan, pertanian, maupun pembangunan yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusianya, begitupun juga harapan masyarakat desa Tumpangkrasak. Pada tahun 2020 Desa Tumpangkrasak mengadakan pemilihan kepala desa yang pada saat itu hanya ada dua kandidat calon Kades. Dengan nomor urut 1 beliau bapak Sarjoko Saputro dan nomor urut 2 beliau bapak Bambang Gunarjo yang tak lain adalah kepala desa sebelumnya.

Karena dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi desa Tumpangkrasak membutuhkan sosok kepala desa yang lebih modern dalam berfikir dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan visi misi yang ditawarkan bapak Sarjoko Saputro akhirnya terpilih dan dipercaya masyarakat desa untuk diberi tugas sebagai kepala desa Tumpangkrasak periode 2020-2025. Beliau dikenal sebagai sosok aktivis muda desa yang dulunya juga aktif dalam berbagai organisasi dalam dan luar desa. Selain itu beliau juga ramah, mudah bergaul, serta bisa memberikan solusi dalam berbagai permasalahan desa, sehingga masyarakat percaya dan beliau dianggap mumpuni untuk memimpin Desa Tumpangkrasak.

Gaya kepemimpinan adalah seperangkat karakteristik yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh pemimpin seperti memberi perintah, memberikan tugas, menegakkan disiplin, memberi teguran, berkomunikasi, dan sebagainya. Desa Tumpangkrasak merupakan desa dengan pemimpin yang dapat membangun desa lebih maju yang telah mencapai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dll. Sejak dipimpin oleh Sarjoko Saputra, kepemimpinannya begitu terbuka dan transparan sehingga

segala keterbatasan dan kekurangan telah diperbaiki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya spanduk disetiap sudut desa yang berisikan informasi tentang APBD, rencana umum pengadaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Semua pembangunan berjalan lancar berkat transfer dana dari pemerintah dan Dana Pendapatan Pokok Desa (PADes). Selain itu banyak program populis atau program pro kesejahteraan yang dilakukan oleh Sarjoko, misalnya adanya Pasar rakyat setiap minggu hal tersebut dilakukan guna untuk memajukan UMKM warga desa Tumpangkrasak.

Dari uraian peneliti di atas, bagaimana etika politik Islam dalam pemerintahan dan kemudian menjadi latar belakang penulisan penelitian yang berjudul “Etika Politik Kepala Desa Tumpangkrasak Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”.

B. Fokus Penelitian

Secara garis besar penelitian ini akan membahas Etika Politik Kepala Desa dalam Mengelola Pemerintahan di Desa Tumpangkrasak Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah yang akan lebih fokus pada kepemimpinan Bapak Sarjoko Saputro yang merupakan Kepala Desa Tumpangkrasak yang mulai menjabat dari 2020 sampai sekarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepemimpinan politik kepala desa Tumpangkrasak ?
2. Bagaimana etika politik kepala desa dalam mengelola pemerintahan di Desa Tumpangkrasak berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan politik kepala desa Tumpangkrasak, dan

2. Untuk mengetahui etika politik kepala desa dalam mengelola pemerintahan di Desa Tumpangkrasak dengan menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam merumuskan kebijakan khususnya di Desa Tumpangkrasak mengenai peran etika politik dalam memenuhi tugas atau tanggung jawab pemerintahan secara luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi, dan juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti lain untuk mempelajari pemikiran politik Islam dan teori etika politik di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan oleh peneliti. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari tiga bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, dimana dalam penelitian ini meliputi latar belakang masalah fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ini menjelaskan kerangka teori yang menguraikan deskripsi ringkasan landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan saat ini sedang di tangani, etika politik perspektif Ibnu Taimiyah, kerangka teori yang memaparkan teori kepemimpinan, pada bab ini juga terdapat pendahuluan penelitian yang menguraikan penjelasan

mengenai kajian beberapa penemuan penelitian terdahulu yang berupa artikel maupun jurnal yang terkait, pada bab ini menjelaskan beberapa pembahasan secara merinci dan kerangka pikirannya.

BAB III : Metode Penelitian Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Setting penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian dilakukan. Kemudian berisi subyek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu bab ini dijelaskan pula mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang etika politik kepala desa di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran-lampiran berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁴

¹⁴